

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS PENYALAHGUNAAN DANA DESA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 dikelola berdasarkan asas-asas transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan dilakukan secara tertib dan disiplin terhadap anggaran. Penyalahgunaan dana desa adalah kejahatan besar yang dapat menghinggapi siapa saja dalam lingkungan sekitarnya, tidak mengenal jabatan dan status sosial.

Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah 1. Bagaimana penerapan hukum terhadap penyalahgunaan dana desa dalam tindak pidana korupsi dilihat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 2. Bagaimana Proses Penegakan Tindak Pidana Korupsi Yang Diduga Dilakukan Pejabat Desa. Sedangkan tujuan 1. Untuk menganalisis penerapan hukum terhadap penyalahgunaan dana desa dalam tindak pidana korupsi dilihat dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 2. Untuk menganalisis Proses Penegakan Tindak Pidana Korupsi Yang Diduga Dilakukan Pejabat Desa.

Dalam menjawab permasalahan tersebut, penelitian menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Sesuai dengan masalah tersebut, data yang digunakan penelitian konseptual approach, dan penelitian pustaka yang kemudian dianalisis menjadi data yang dapat diterjemahkan dan dapat dimengerti. Teknik penelitian ini menggambarkan secara yuridis normatif yang sesuai dengan interpretasi gramatikal, formal menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah - kaidah hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan 1. Penerapan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi yang banyak dilakukan Pemerintahan Desa berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pada dasarnya tindak pidana korupsi dana desa, termasuk dalam unsur: 2. Proses penegakan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan pejabat desa harus diperketat sesuai prinsip *good goverment* dan dilakukan pengawasan, sesuai Pasal 377 UU Desa dinyatakan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah. Kemudian pelaksanaan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan, adapun fungsi pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional.

Kesimpulan a) Penerapan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Dana Desa Dalam Tindak Pidana Korupsi yang banyak dilakukan Pemerintahan Desa berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, pada dasarnya tindak pidana korupsi dana desa, termasuk dalam unsur Kerugian keuangan negara, b) Proses penegakan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan pejabat desa harus diperketat sesuai prinsip *good goverment* dan dilakukan pengawasan, sesuai UU Desa

Kata Kunci : Penyalahgunaan, Dana Desa dan Korupsi

ABSTRACK

REVIEW ABUSE JUDICIAL FORMALITY LENTS FUND VILLAGE IN ACTS PIDANA CORRUPTION

Silvan financial management bases Number Ministry Of Home Affairs regulation 20 Years 2018 be brought off base transparency grounds, akuntabilitas, participative and done by order and discipline ala to budget. Abuse lents fund village be criminological big one get to light upon who just in its vicinity environment, don't know responsible position and social state.

Problem that is analyzed in this paper is 1. How implement sentence for abuse to lent fund village in acts pidana corruption is seen from Number Law 31 Years 1999 About Remove Acts Pidana Corruptions 2. How Processes Penegakan To Act preconceived Corruption Pidana done by Village Official. Meanwhile aim 1. For menganalisis implement sentences for abuse to lent fund village in acts pidana corruption is seen from Number Law 31 Years 1999 About Remove Acts Pidana Corruptions. 2. For menganalisis To Process Penegakan Acts preconceived Corruption Pidana done by Village Official.

In answers about problem that, research utilizes research that gets normatif's judicial formality character. According to that problem, data that utilized by approach's conceptual research, and library research is next dianalisis becomes translatable data and get apprehended. This observational tech mengambarkan normatif's judicial formality ala that corresponds to grammatical interpretation, formal terminological quality and its truth, then linked by theories, grounds, and prevailing law method.

Result observationaling to point out 1. Implement Sentences for Abuse To Lent Fund Village In Acts Pidana there are many Corruption done by Village Governance bases on 31Tahun's Number Law 1999 jo. Number law 20 Years 2001, basically acts pidana corruption lents fund village, include in element: 2. penegakan's process acts preconceived corruption pidana done by village official shall diperketat accord principle good goverment and done by observation, accord Section 377 UU Village is declared for that observation on region governance management performed by government. Then performing by intern's supervisor agency government accords legislation regulation, adapapun is observation function that did by functional supervisor agency.

a's conclusion) Implement Jurisdictionaling to Abuse Lents Fund Village In Acts Pidana there are many Corruption done by Village Governance bases on 31Tahun's Number Law 1999 jo. Number law 20 Years 2001, basically acts pidana corruption lents fund village, include in element Disadvantages state finance, b) penegakan's Processes acts preconceived corruption pidana done by village official shall diperketat accord principle good goverment and done by observation, accord UU Silvan

Key word: Abuse, Silvan fund and Corruption